

# STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WISATA TERINTEGRASI

**Arie Setiadi Moerwanto**  
Direktorat Jenderal Bina Marga  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat  
dirjenbm@pu.go.id

**Triono Junoasmono**  
Direktorat Jenderal Bina Marga  
Perencanaan Integrasi dan Jaringan Sistem  
hpjjakarta@yahoo.com

## Abstract

Development of Tourism Infrastructure is one of the vital aspect to support Indonesia economic growth. On Presiden's "Nawa Cita" Program, tourism is one of National priority programs. According to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50/2011, about Master Plan for National Tourism Development 2010-2025, there are 88 National Tourism Strategic Areas (KSPN) that scattered along Indonesia territory. From 88 KSPN, Ministry of Tourism prioritized tourism area development in 25 KSPN. Through Letter from Coordinating Ministry of Maritime and Resources Affairs, it focused became 10 priorities KSPN, i.e. Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi and Morotai. Overall, the government, through the Ministry of Public Works and Housing (MPWH) and specifically Directorate General of Highways, has supported tourism areas development by providing access road through national road network. In 2018, Directorate General of Highways will focus on road infrastructure development in 3 priority KSPN, i.e. Danau Toba, Borobudur, and Mandalika. Program development of tourism areas in Indonesia still needs comprehensive and integrated program support through the master plan preparation. To follow-up, the MPWH through Regional Infrastructure Development Agency will responsible to prepare the master plan of those three priority KSPN.

**Keywords:** infrastructure, master plan, National Tourism Strategic Areas, Nawa Cita, tourism

## Abstrak

Pengembangan infrastruktur kepariwisataan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam program "Nawa Cita" Presiden, pariwisata menjadi salah satu program prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 88 KSPN tersebut, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan kawasan pariwisata pada 25 KSPN hingga tahun 2019. Kemudian melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, dari 25 KSPN difokuskan menjadi 10 KSPN Prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Secara umum, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Ditjen Bina Marga telah mendukung pengembangan kawasan pariwisata tersebut dengan menyediakan jalan akses melalui jaringan jalan nasional. Pada tahun 2018, Ditjen Bina Marga akan memfokuskan pengembangan infrastruktur jalan pada 3 KSPN prioritas, antara lain Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Pengembangan program pada kawasan pariwisata di Indonesia masih membutuhkan dukungan program yang komprehensif dan terintegrasi melalui penyusunan masterplan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan menyusun masterplan untuk ketiga KSPN prioritas tersebut.

**Kata-kata kunci:** infrastruktur, masterplan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Nawa Cita, pariwisata

## LATAR BELAKANG

Infrastruktur merupakan salah satu tonggak perekonomian yang penting untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut survei pada indeks persaingan global pada tahun

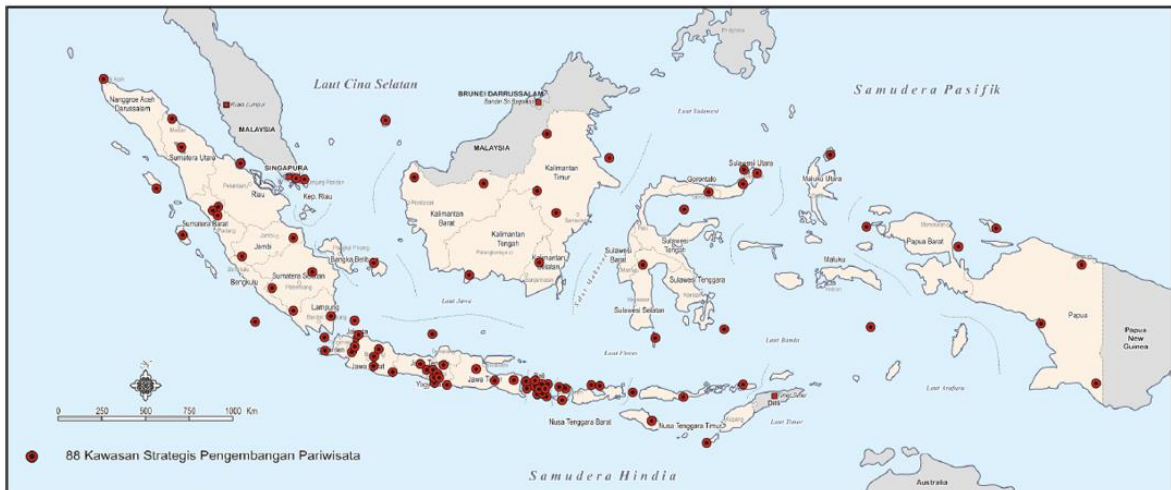
2016-2017, Indonesia menduduki peringkat ke-60 pada pilar infrastruktur (World Economic Forum, 2017). Kepariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan *The World Tourism Organization* (UNWTO) sebagai bagian dari PBB telah menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (*Sustainable and Responsible Tourism*). Pembangunan Kepariwisata adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional. Adapun cita-cita pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah terwujudnya kepariwisataan yang dapat: (i) menjaga kebebasan, kemandirian, keutuhan bangsa dan wilayah; (ii) memupuk rasa cinta tanah air, persatuan, kebhinekaan, jati diri bangsa, dan meningkatkan persahabatan antarsuku/antarbangsa, dan perdamaian, seperti yang disampaikan dalam Sambutan Menteri Pariwisata Republik Indonesia pada Peringatan World Tourism Day dan Hari Kepariwisata Nasional.

Presiden RI telah menetapkan “Nawa Cita” sebagai program prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2015-2019. Pada Kabinet Kerja, sektor kepariwisataan tumbuh menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menjadi lokomotif untuk penerimaan devisa negara, pengembangan usaha, pembangunan infrastruktur, serta penyerapan tenaga kerja.

## **PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DALAM Mendukung Pengembangan Pariwisata**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, berperan penting dalam meningkatkan infrastruktur jalan nasional di Indonesia. Pembangunan jalan nasional di Indonesia harus menghubungkan kawasan-kawasan penting seperti Kawasan Ekonomi Nasional, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Wilayah, dan Kawasan Ekonomi Lokal sehingga rantai distribusi bahan baku, bahan jadi, dan hasil produksi dapat dengan mudah menjangkau setiap wilayah di nusantara. Selain itu, pengembangan infrastruktur di Kawasan Pariwisata juga penting untuk digerakkan karena merupakan sumber ekonomi daerah dan sebagai sumber devisa negara. Direktorat Jenderal Bina Marga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN Prioritas dengan cara: (i) menghubungkan *outlet* ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau sebagai jalan penghubung antar-KSPN, dan (ii) menghubungkan simpul transfer antarmoda.

Secara keseluruhan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1** Peta Sebaran 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Terdapat 25 KSPN Prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019. Dari 25 KSPN Prioritas tersebut, Kementerian Perekonomian Bidang Maritim dan Sumber Daya memfokuskan pengembangan pada 10 KSPN Prioritas. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah ditetapkan 5 KSPN Prioritas sampai akhirnya menjadi 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah saat ini sedang menyusun Masterplan Pengembangan KSPN Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika melalui pinjaman dana dari Bank Dunia.



**Gambar 2** Kronologis Pemfokusan KSPN Prioritas

**STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA OLEH DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA TERHADAP 10 KSPN PRIORITAS**

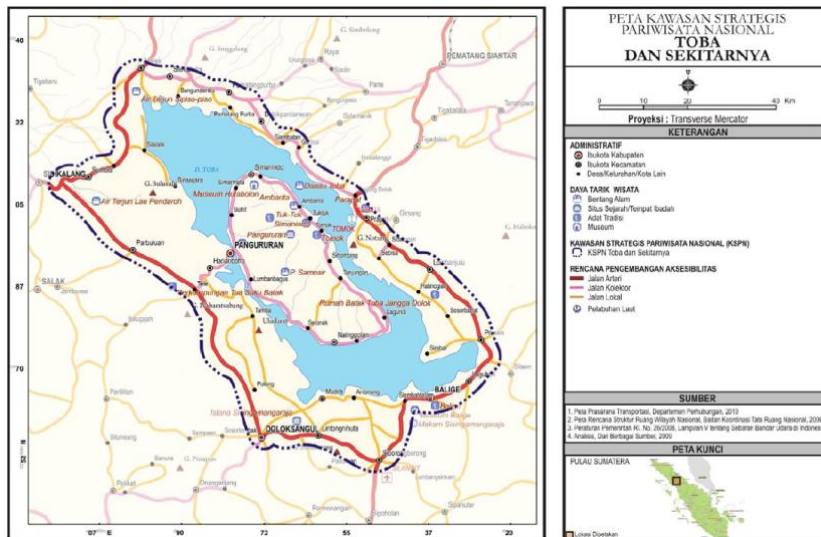
Terdapat 25 KSPN prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019. Untuk memfokuskan pengembangan infrastruktur pariwisata, dari 25 KSPN tersebut ditetapkan 10 KSPN prioritas yang akan didukung oleh Ditjen Bina Marga sebagai berikut.



Sumber: Surat Undangan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Gambar 3 Lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

### KSPN Danau Toba, Sumatera Utara



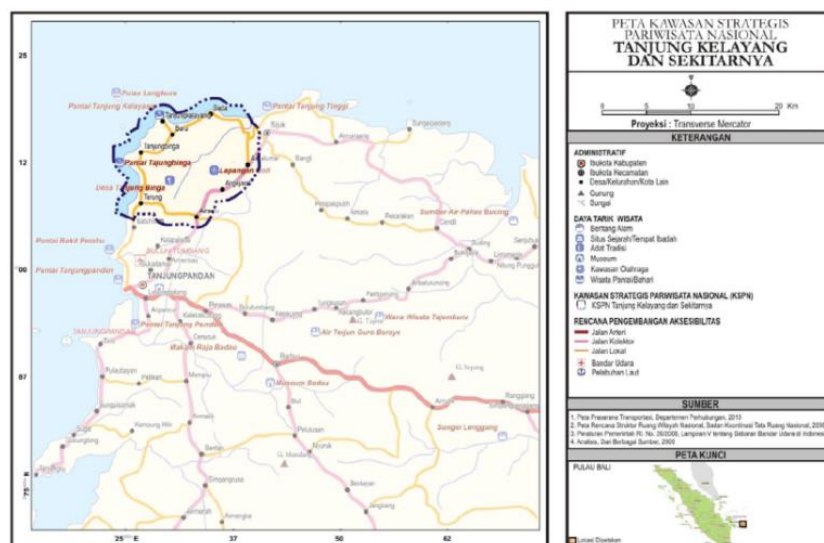
Gambar 4 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Toba dan Sekitarnya

Rencana pengembangan KSPN Danau Toba telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba juga merupakan salah satu KSPN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3

tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dukungan Ditjen Bina Marga untuk Jalan Nasional adalah: (1) Dukungan Jalan Nasional (Non-Tol) melalui jalan Lintas Tengah, Lintas Timur, dan Penghubung Lintas; (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi Jalan Nasional untuk mendukung KSPN Danau Toba, yaitu: (i) Lingkaran dalam P. Samosir: Jalan Tomok–Ambarita–Simanindo–Pangururan–Nainggolan–Onan Runggu–Tomok, (ii) Jembatan penghubung P. Samosir, yaitu Jalan Tele–Pangururan (Tanah Ponggol), (iii) Akses penyeberangan (ferry), yaitu Jalan Parapat–Pelabuhan Aji Bata, dan (iv) Akses bandar udara, yaitu Jalan Sp. Silangit–Bandara Silangit; serta (3) Dukungan Jalan Nasional (Tol) Rencana Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi–Parapat–Sibolga dengan prioritas ruas Tebing Tinggi–Parapat ditargetkan beroperasi tahun 2019 (penugasan PT Utama Karya).

### KSPN Tanjung Kelayang, Bangka Belitung

KSPN Tanjung Kelayang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 5, yaitu Jambi–Palembang–Pangkal Pinang–Tanjung Pandan. Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Tanjung Kelayang adalah: (1) Mempertahankan kondisi kemandirian jalan nasional eksisting, yaitu: (i) Akses bandar udara: Perawas-Sp. 3 Lapangan Terbang, dan (ii) Akses KSPN Tanjung Kelayang: Jalan Junction (Sp. Lima Tj. Pandan)–Tanjung Kelayang–Tj. Tinggi (Sujuk) termasuk jalan dalam kota.

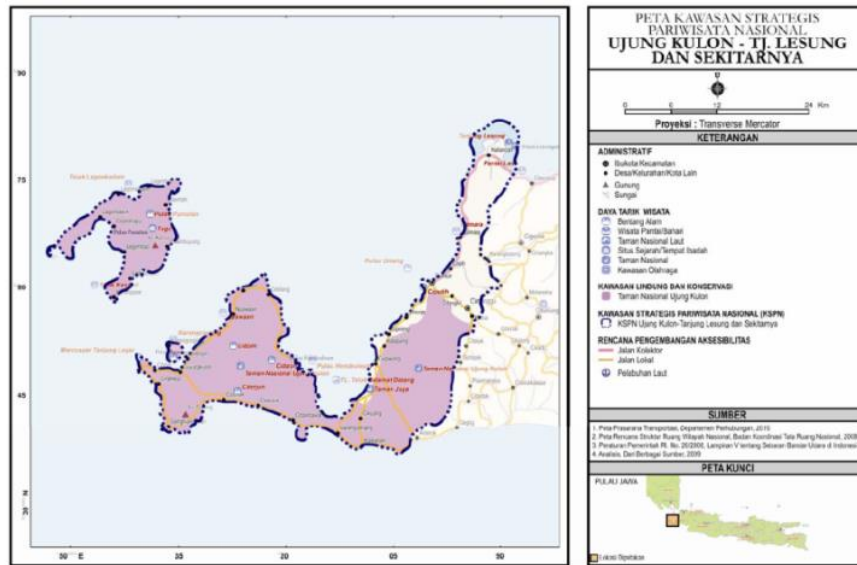


**Gambar 5** Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Kelayang dan Sekitarnya

### KSPN Tanjung Lesung, Banten

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Tanjung Lesung ditetapkan sebagai Zona Pariwisata. Beberapa tempat menarik pada kawasan wisata Tanjung Lesung meliputi kampung wisata, Pantai Bodur, dan Pulau Liwungan. Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Tanjung Lesung adalah: (1) Dukungan Jalan Nasional (Non-Tol) melalui jalan Lintas Utara, Lintas

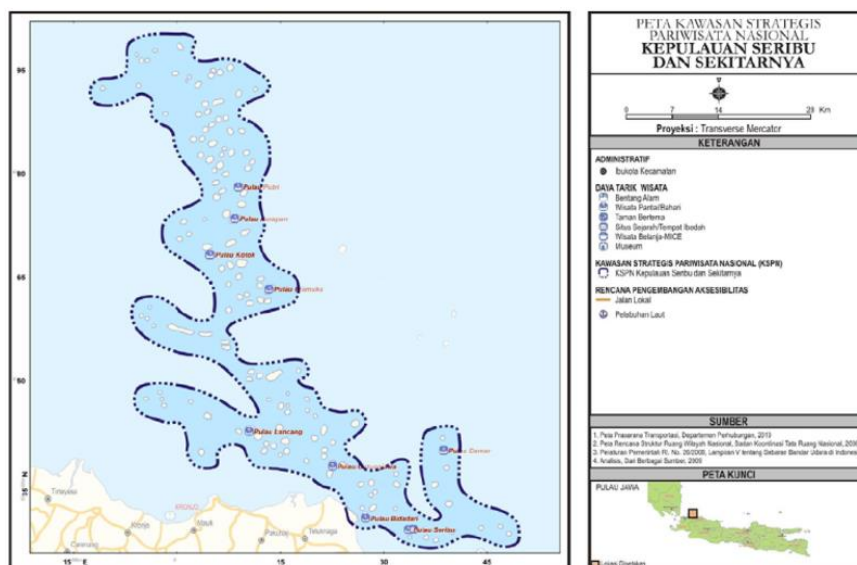
Tengah, dan Lintas Pantai Selatan; (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Tanjung Lesung, yaitu: (i) Jalan Citeureup–Tj. Lesung, dan (ii) Jalan Cibaliung–Sumur; dan (3) Dukungan Jalan Nasional (Tol) Rencana Pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang.



**Gambar 6** Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Ujung Kulon–Tj. Lesung dan Sekitarnya

### KSPN Pulau Seribu, DKI Jakarta

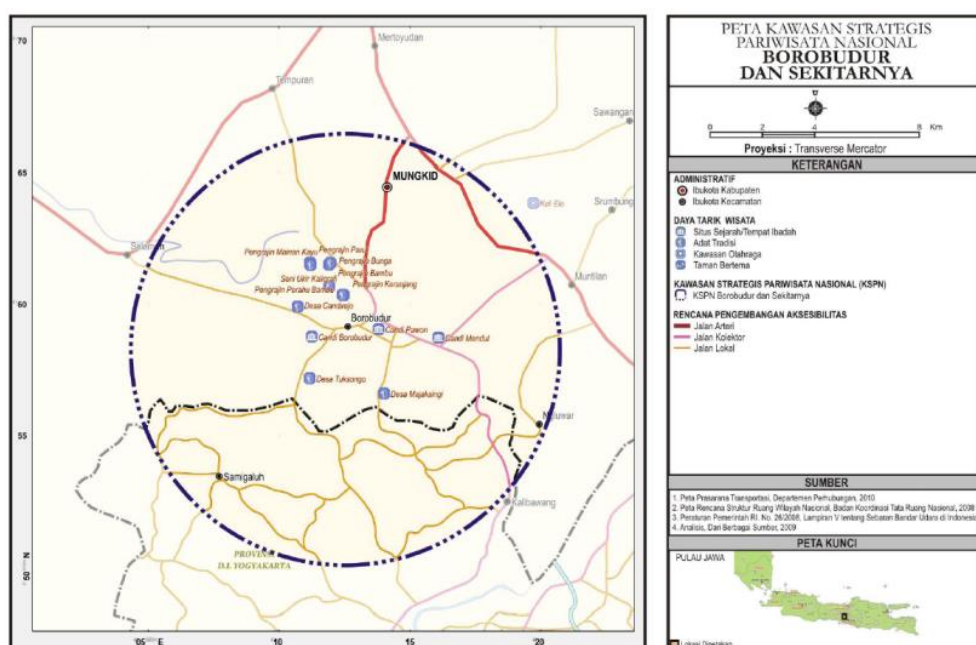
KSPN Pulau Seribu merupakan salah satu KSPN yang tercantum dalam Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penanganan jalan ditangani langsung oleh Pemda DKI Jakarta, mengingat keberadaan jaringan jalan nasional di wilayah DKI Jakarta telah diambil alih oleh Pemda DKI.



**Gambar 7** Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu dan Sekitarnya

### KSPN Borobudur, Jawa Tengah

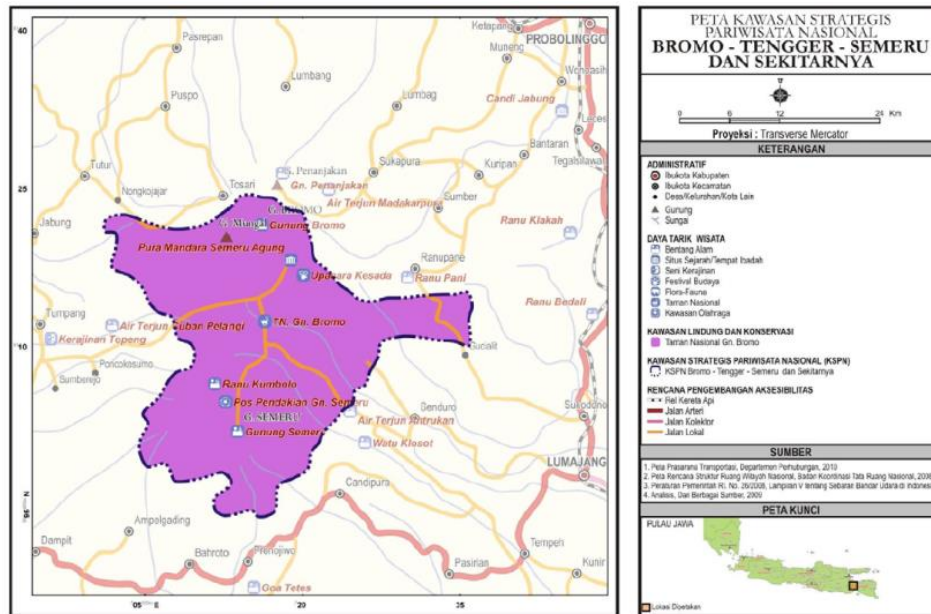
Rencana pengembangan KSPN Borobudur telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Borobudur juga merupakan salah satu KSPN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap jalan nasional adalah: (1) Dukungan jalan nasional (non-tol) melalui jalan Lintas Tengah, Lintas Selatan dan Penghubung Lintas; (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Borobudur, yaitu Jalan Keprekan–Borobudur; dan (3) Dukungan jalan nasional (tol) rencana pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen.



**Gambar 8** Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Sekitarnya

### KSPN Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur

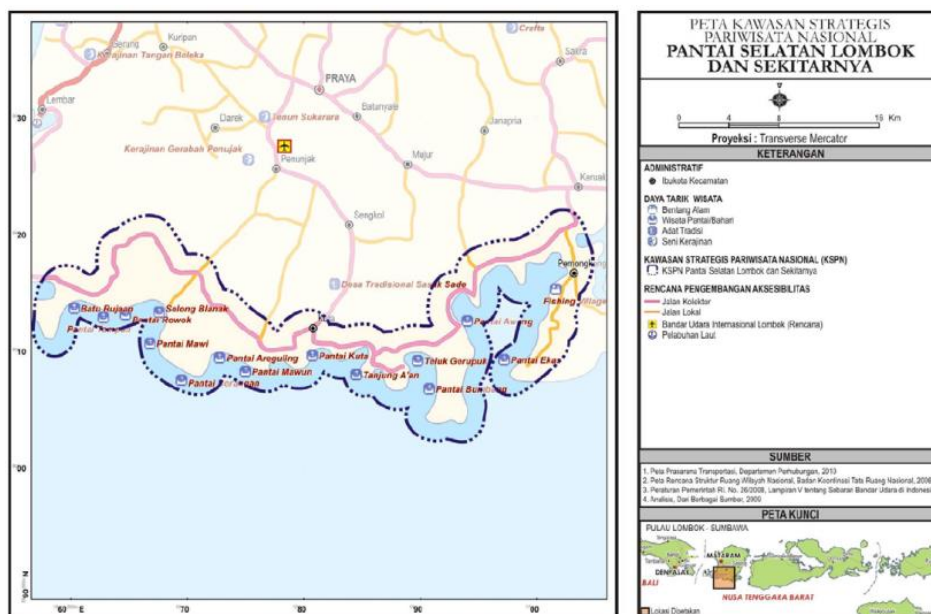
KSPN Bromo, Tengger, Semeru termasuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 12, yaitu Yogyakarta–Prigi–Blitar–Malang. Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Bromo, Tengger, Semeru adalah: (1) Dukungan jalan nasional (non-tol) melalui Jalan Lintas Utara, Lintas Selatan, dan Penghubung Lintas; (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Bromo, Tengger, Semeru, yaitu Jalan Lawean–Sukapura; dan (3) Dukungan jalan nasional (tol) rencana pembangunan jalan tol: (i) Gempol–Pasuruan (34,15 km), dengan operasional Gempol–Rembang sepanjang 13,9 km, (ii) Pandaan–Malang (status 20 Juli 2016 adalah pengadaan tanah 27,69%, PPJT 9 Juni 2016), (iii) Pasuruan–Probolinggo (status 20 Juli 2016 adalah persiapan pengadaan tanah, SP2LP belum terbit), dan (iv) Robolinggo–Banyuwangi.



Gambar 9 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo–Tengger–Semeru dan Sekitarnya

### KSPN Mandalika, NTB

KSPN Mandalika terdapat dalam PP No. 52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Mandalika ditetapkan sebagai Zona Pariwisata. Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Mandalika adalah: (1) Dukungan jalan nasional (non-tol) melalui Jalan Lintas Pulau Lombok; dan (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Mandalika, yaitu: (i) Akses Bandar Udara Internasional Lombok: Jalan Praya–Sp. Penunjak–Tanah Awu (BIL), (ii) Akses menuju KSPN Mandalika: Jalan Tanah Awu–Sengkol–Kuta.

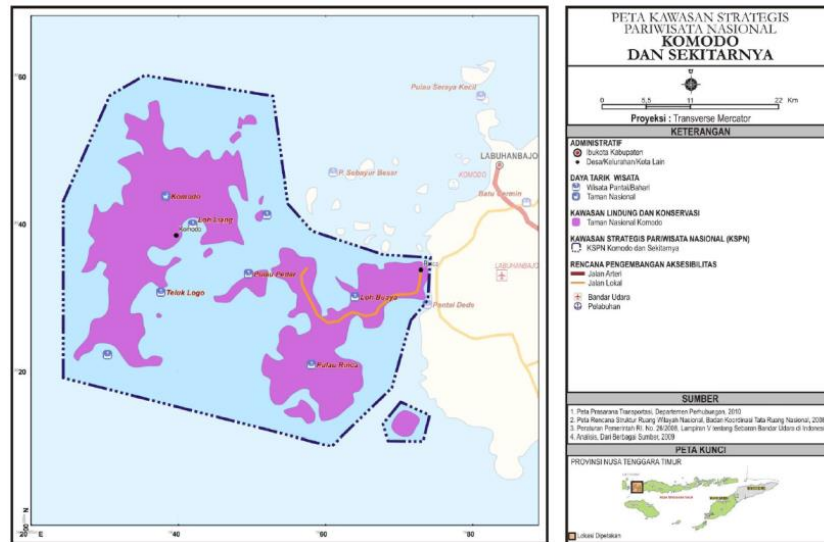


Gambar 10 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya



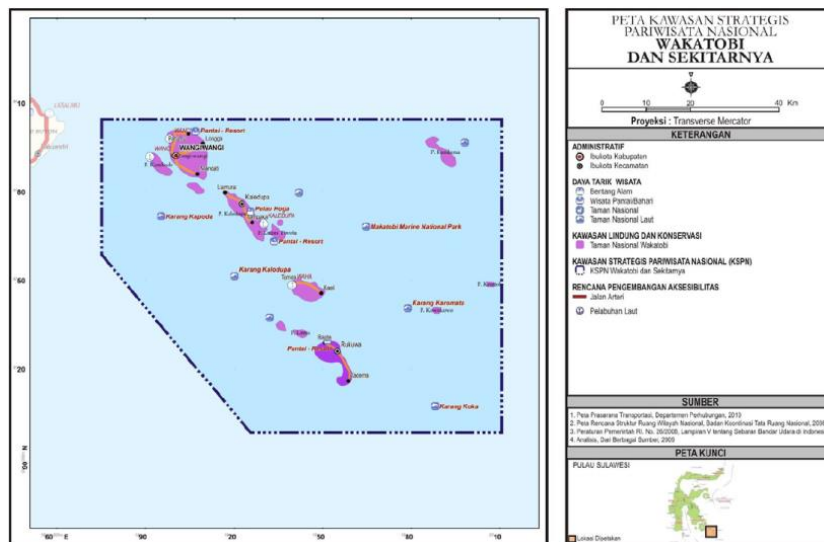
## KSPN Labuhan Bajo Komodo, NTT

Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Labuhan Bajo Komodo adalah: (1) Dukungan jalan nasional (non-tol) melalui jalan Lintas Pulau Flores dan Pulau Timor; dan (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Komodo, yaitu: (i) Jalan dalam kota Labuhan Bajo: Jln. Waetama, Jln. Van Bekkum, dan Jln. Yohanis Sahadun.



Gambar 1 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo dan Sekitarnya

## KSPN Wakatobi, Sulawesi Tenggara



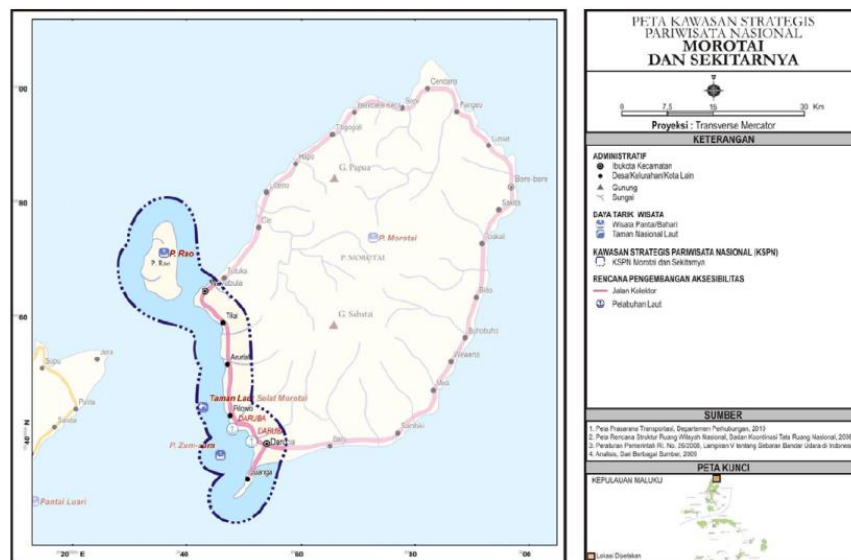
Gambar 12 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi dan Sekitarnya

Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Wakatobi adalah: (1) Dukungan jalan nasional (non-tol) melalui jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi; dan (2) Peningkatan

status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Wakatobi, yaitu (i) Akses Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), yaitu Lasalimu–Kamaru (dermaga ferry), dan (ii) Akses menuju bandar udara di P. Wangi-wangi, yaitu Jalan Wanci–Topanuanda–Jalan Masuk Bandara.

### KSPN Morotai, Maluku Utara

Dukungan Ditjen Bina Marga terhadap KSPN Morotai adalah: (1) Dukungan jalan nasional (eksisting): (i) Jalan keliling P. Morotai: Bts. Kota Daruba–Sangowo/Daeo–Berebere; (2) Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Morotai, yaitu Jalan keliling P. Morotai, yang mencakup Jalan Berebere–Sofi dan Jalan Wayabula–Daruba; dan (3) Rencana peningkatan status jalan daerah menjadi Jalan Nasional (jika sudah fungsional), yaitu Jalan keliling P. Morotai yang mencakup Jalan Wayabula–Sofi.



**Gambar 13** Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai dan Sekitarnya

## TANTANGAN, HAMBATAN, DAN TINDAK LANJUT

Direktorat Jenderal Bina Marga saat ini sedang mempersiapkan dukungan program untuk 10 destinasi pariwisata prioritas tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengembangan infrastruktur pariwisata adalah:

- 1) Belum terdapat Masterplan Pariwisata untuk mengidentifikasi destinasi dan kebutuhan infrastruktur khususnya jalan dalam mendukung kawasan pariwisata tersebut.
- 2) Keterbatasan anggaran yang ada dibandingkan dengan jumlah kebutuhan untuk memenuhi target pembangunan.

Adapun tindak lanjut dari Ditjen Bina Marga untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain, adalah:

- 1) Mendetailkan program dukungan infrastruktur jalan melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah untuk menyusun Masterplan Pariwisata yang komprehensif dan terintegrasi khususnya pada 3 KSPN Prioritas.
- 2) Mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman luar negeri dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan “Nawa Cita” Presiden RI, sektor kepariwisataan tumbuh menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menjadi lokomotif untuk penerimaan devisa negara, pengembangan usaha, pembangunan infrastruktur, serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap kawasan-kawasan pariwisata.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Bina Marga berperan dalam pembangunan aksesibilitas dan konektivitas menuju dan di dalam kawasan pariwisata tersebut. Terdapat 25 KSPN yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019. Kementerian Perekonomian Bidang Maritim dan Sumber Daya mengerucutkan 25 KSPN tersebut menjadi 10 KSPN, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Pulau Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuhan Bajo Komodo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Saat ini Ditjen Bina Marga sudah menganggarkan penanganan untuk KSPN-KSPN tersebut. Akan tetapi, kendala yang dihadapi oleh Ditjen Bina Marga adalah keterbatasan anggaran yang ada sehingga hanya diprioritaskan pada penanganan 3 KSPN sampai tahun 2019 dan belum adanya masterplan yang dijadikan acuan untuk menentukan lokasi-lokasi destinasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berperan dalam menyusun masterplan KSPN terutama pada 3 KSPN Prioritas sampai tahun 2019, yaitu Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. 2016. *Surat Undangan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Nomor 124/D3/Maritim/VI/2016 tentang Undangan Rapat Koordinasi Dukungan Infrastruktur di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas*. Jakarta.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- World Economic Forum. 2017. *The Global Competitiveness Report 2016-2017*. Cologny.